

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA
(WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961
DAN KONVENSI WINA 1963
(STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK
TALIBAN)**

Oleh :

Gede Yudiarta Wiguna, NIM 1814101022

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Agar dapat mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang memuat tentang perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu negara (2) Agar dapat mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi kasus Warga Negara Indonesia pada kasus ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok Taliban). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yang mengatur tentang Hukum Diplomatik dan Konsuler. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menelaah kerangka normatif serta teknik studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang memuat tentang hukum diplomatik dan konsuler khususnya memuat tentang Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya untuk memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan bentuk pelaksanaan tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik dan konsuler yang telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Poin (a) Konvensi Wina 1963 serta Pasal 3 Ayat (1) Poin b dan c Konvensi Wina 1961, (2) Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan. Dengan tujuan memperbaiki hubungan antara negara Indonesia dengan Negara Afghanistan, mempertahankan hak-hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Afghanistan, serta memperbaiki kondisi psikis dan mental korban akibat dampak dari konflik tersebut. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan upaya perlindungan secara politis dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga Internasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warga Negara Indonesia, Ambil alih kekuasaan, dampak konflik, Konvensi Wina 1961 & 1963.

**LEGAL PROTECTION AGAINST INDONESIAN CITIZENS (WNI) IN
AFGHANISTAN BASED ON THE VIENNA 1961 CONVENTION AND
VIENNA CONVENTION 1963
(CASE STUDY TOOK OVER AFGHANISTAN BY THE TALIBAN GROUP)**

By :

Gede Yudiarta Wiguna, Nim. 1814101022.

Legal study program

ABSTRACT

This study aims to (1) in order to find out and assess the arrangements regarding diplomatic and consular relations that contain legal protection for foreign nationals (WNA) living in a country (2) in order to know and examine the form of a legal protection of a country experiencing Conflict against foreign nationals (WNA) based on the Vienna 1961 Convention and the Vienna 1963 Convention (case study of Indonesian citizens in the case of Afghan authority by the Taliban group). The type of research used is normative legal research, with the type of laws and regulatory approach, conceptual approach, and historical approach. The source of legal material used is inseparable from the rules that exist in international law by specializing settings that regulate diplomatic and consular laws. The legal material collection technique used is by means of a library research or literature study. Collection of legal material is done by reviewing the normative framework and document study techniques using legal materials that contain the diplomatic and consular law especially containing the Vienna 1961 convention and Vienna 1963 Convention. The results of the study show that (1) efforts to provide Indonesian citizens' protection (WNI) is a form of implementation of duties and functions of diplomatic and consular representatives that have been regulated in Article 5 paragraph (1) points (a) Vienna 1963 Convention and Article 3 paragraph (1) point B and C Vienna Convention 1961 (2) legal protection Repressive that can be done is to provide legal assistance in the form of legal consultation and humanitarian assistance. With the aim of improving relations between the State of Indonesia and Afghan countries, defending the Rights of the Indonesian State Warga (WNI) in Afghanistan, and improve the psychological and mental conditions of the victims due to the impact of the conflict. Preventive legal protection that can be done is to provide politically protection efforts and cooperation with international institutions or institutions.

Keywords: legal protection, Indonesian citizens, take power over, the impact of conflict, convention of Vienna 1961 & 1963.